



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**TANDA TERIMA TAMBAHAN BERKAS BAWASLU
NOMOR 981-07-24/BW-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**

Hari/Tanggal/Pukul : Jum'at, 12 Juli 2019 Pukul 10.23 WIB
Pemberi Keterangan : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor APKB : 30-07-24/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019
Nomor Perkara : 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

| NO. | NAMA BERKAS PERKARA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|---------------------|--------|---|
| 1 | Flash Disk | 1 unit | isi: Keterangan Tertulis, Daftar Bukti, Alat Bukti. |

Jakarta, 12 Juli 2019

Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.



Panitera
Muhidin - NIP. 19810818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU
Nomor 30-07-24/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **empat** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **15:52 WIB**, telah diajukan Keterangan BAWASLU, oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBERI KETERANGAN;**

Dalam perkara antara:

Partai Beringin Karya (Berkarya), Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, Pada Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 216-07-24/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan registrasi perkara Nomor 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Terhadap Keterangan Bawaslu tersebut, Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



Keterangan:



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran:

APKB Nomor 30-07-24/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

DAFTAR KELENGKAPAN KETERANGAN BAWASLU (DKKB)

Pemberi Keterangan : Fadliansyah,
Provinsi : Kalimantan Utara (Kaltara)

| HAL-HAL YANG DIPERIKSA | | ADA/TIDAK | KETERANGAN |
|--|---|-----------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (3) |
| 1. Keterangan Tertulis. | 1. 4 rangkap | Ada | |
| | 2. Tertulis dalam bahasa Indonesia | Ada | |
| | 3. Ditandatangani oleh Bawaslu/Kuasa Hukum | Ada | 1 bh Surat Tugas Bawaslu Asli 1 lbr |
| 2. Daftar Alat Bukti | 4 rangkap. | Ada | |
| 3. Alat Bukti Surat atau Tertulis | 4 rangkap. | Ada | |
| 4. Alat Bukti Lain | | Tidak | |
| 5. Penyimpan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flashdisk</i>) | 1. 1 unit | Tidak | |
| | 2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat/dokumen dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> . | Tidak | |

Jakarta, 04 Juli 2019

Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.